

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Warga negara didefinisikan sebagai penduduk dari sebuah negara yang ditentukan berdasarkan keturunan atau pun domisili di mana orang tersebut dilahirkan, sehingga secara otomatis pada diri warga negara tersebut akan melekat hak dan beragam kewajiban yang harus dipenuhinya.<sup>1</sup> Imigran merupakan warga negara suatu negara yang tinggal atau berdomisili di negara lain, yang secara penuh mendapatkan hak perlindungan, perhatian maupun jaminan keamanan dari negara tempat imigran tersebut berasal. Salah satu contohnya adalah merupakan kewajiban dari suatu negara untuk menjaga dan melindungi warga negaranya dari segala macam ancaman maupun ketidaknyamanan dalam berkehidupan sosial di negara lain. Terdapat beberapa hal yang menjadi latar belakang dari para imigran hidup di negara lain. Pada umumnya pilihan bekerja di luar negeri seringkali dijadikan alasan klasik oleh para imigran agar diperoleh pengalaman-pengalaman baru dalam kehidupan mereka. Namun juga tidak menutup kemungkinan bahwa seseorang menjadi imigran karena alasan studi lanjut, menempuh pendidikan yang lebih tinggi dari pendidikan yang telah diperolehnya, misalnya menempuh pendidikan S2 atau S3. Perwakilan-perwakilan dari setiap negara yang berada di luar wilayah negara mereka (luar negeri) merupakan salah satu cara dan upaya untuk menjalin dan memelihara hubungan kerja sama antar-negara di segala bidang di dunia ini, dan mereka mengenalnya dengan hubungan diplomasi. Secara etimologis, kata diplomasi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah segala urusan atau pun penyelenggaraan hubungan resmi antar-negara melalui perwakilannya di negara lain. Kegiatan diplomasi ini dilakukan

---

<sup>1</sup> Alamari, Muhammad Fauzan. "Imigran dan Masalah Integrasi Sosial." *Jurnal Dinamika Global* Vol.5, no.2

dengan mengirim dan menempatkan para diplomat maupun para konsuler mereka ke negara tujuan, dapat berupa Duta Besar dan Konsulat Jenderal seperti halnya perwakilan Indonesia yang berada di Australia, sedangkan Amerika Serikat berdasarkan berbagai kepentingannya di Indonesia memiliki 4 (empat) perwakilan yaitu kedutaan besar, konsulat jenderal, konsul, dan konsuler.

Pada dasarnya Indonesia menjalin hubungan diplomatik terhadap hampir semua negara di dunia ini, berdasarkan data hingga kini Indonesia telah menempatkan sebanyak 132 perwakilan di negara-negara lain yang terdiri atas 95 kedutaan besar, 30 Konsulat Jenderal, 4 Konsulat, 64 Konsul Kehormatan dan 3 Perutusan tetap untuk Perserikatan Bangsa- Bangsa di Jenewa dan New York.<sup>2</sup> Salah satu hubungan diplomasi yang cukup menarik untuk dibahas dalam kaitannya dengan misi kemanusiaan adalah hubungan diplomasi Indonesia dengan Arab Saudi. Kedua negara merupakan negara besar dengan jumlah penduduk muslim relatif banyak, sehingga diharapkan dapat saling menjaga secara harmonis agar saling menguntungkan. Hubungan diplomasi tersebut berupa kerja sama bilateral di bidang ekonomi, sosial, serta politik, termasuk penentuan kuota, pengiriman, dan pemulangan jamaah Haji, dan Umroh ke Indonesia, maupun kondisi kehidupan sosial para pekerja migran (Pekerja Migran Indonesia/PMI). Berkaitan dengan hubungan diplomasi khususnya kehidupan sosial para imigran/PMI di negara Arab maka munculah berbagai permasalahan terhadap pemberian jaminan keamanan dan hak-hak yang seharusnya diperoleh para imigran tersebut. Hal ini dapat terjadi karena pada umumnya para imigran Indonesia berpendidikan tidak tinggi dengan pengalaman bekerja yang relatif kurang. Salah satu contoh hubungan diplomasi yang tidak berimbang (kurang sehat) antara Indonesia dengan Arab Saudi terjadi pada tahun 2018 yakni kasus hukuman mati yang dijatuhkan kepada Pekerja Migran Indonesia bernama Tuti

---

<sup>2</sup> Kementerian Luar Negeri. Kedutaan/Konsulat. [https://kemlu.go.id/portal/id/page/29/kedutaan\\_konsulat](https://kemlu.go.id/portal/id/page/29/kedutaan_konsulat) (diakses 21 Januari 2022)

Tursilawati yang bersalah karena telah membunuh majikannya tempat ia bekerja. Pemerintah Arab Saudi tidak memberikan penjelasan secara rinci untuk pembelaan PMI tersebut melalui notifikasi, mereka hanya memberitahu tentang pelaksanaan eksekusinya. Pada hal menurut catatan bahwa jumlah para imigran yang bekerja di Arab Saudi pada tahun tersebut sebanyak 961.000 orang. Sudah semestinya negara Arab tersebut mendapat protes keras dari Duta Besar Indonesia yang berada di Arab agar hal serupa tidak terulang kembali pada Pekerja Migran Indonesia lainnya.

Arus gelombang migrasi Warga Negara Indonesia (WNI) yang berkeinginan kuat untuk tinggal menetap di luar negeri relatif cukup tinggi, baik yang bertujuan untuk bekerja di sektor formal, informal, tinggal menetap untuk sementara waktu, maupun yang sedang menempuh studi di luar negeri. Profesi WNI di luar negeri yang bekerja di sektor informal menunjukkan komposisi yang paling banyak di antara tujuan-tujuan untuk tinggal menetap lainnya. Wilayah-wilayah di sekitar Asia dan Timur Tengah merupakan wilayah prioritas utama tujuan para WNI. Hal ini ditunjukkan oleh indikator tingginya angka remitansi sebesar 9.379 miliar dollar AS tahun 2020, yang berasal dari pekerja migran di wilayah Asia dan Timur Tengah. Angka remitansi pekerja sektor informal merupakan salah satu parameter yang sering digunakan untuk mengukur tinggi rendahnya sebaran jumlah pekerja informal di luar negeri.<sup>3</sup> Negara-negara di kawasan Timur Tengah sampai saat ini masih menempati urutan teratas sebagai negara favorit tujuan Pekerja Migran Indonesia (PMI) terutama di sektor informal. Selain alasan karena gaji yang akan didapatkan tinggi, juga karena untuk bekerja di negara-negara tersebut tidak memerlukan keahlian yang tinggi dan spesifik. Kedua hal tersebut merupakan alasan klasik para PMI agar dapat mengubah tingkat kesejahteraan mereka. Sebagian besar Warga Negara Indonesia yang bekerja di sektor informal di negara Saudi Arabia berlatar pendidikan rendah,

---

<sup>3</sup> Paramitaningrum."Model Diplomasi Perlindungan Pemerintah Indonesia terhadap Warga Negara Indonesia Pekerja Sektor Formal dan Informal di Luar Negeri."*Jurnal Global dan Strategis*,No 12 (2018)

tidak banyak dari mereka yang berpendidikan sarjana atau master. Profesi yang dilakukannya cenderung tidak memerlukan keahlian yang tinggi, diantaranya cukup banyak bekerja sebagai asisten rumah tangga, pengasuh anak, dan buruh perkebunan.

Pertumbuhan ekonomi di Indonesia relatif cukup tinggi, berdasarkan data Biro Pusat Statistik tercatat bahwa Perekonomian Indonesia 2020 yang diukur berdasarkan Produk Domestik Bruto (PDB) atas dasar harga berlaku mencapai Rp15.434,2 triliun dan PDB per kapita mencapai Rp 56,9 Juta atau US\$3.911,7.<sup>4</sup> Pada saat ini pertumbuhan ekonomi tersebut belum mampu mengatasi permasalahan jumlah pengangguran dan kemiskinan yang terus meningkat. Hal ini besar kemungkinan disebabkan oleh ketersediaan lapangan-lapangan kerja yang terbatas baik di sektor formal maupun informal, sehingga belum mampu menyerap para pencari kerja yang terus bertambah. Angka Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) yang dikeluarkan oleh BPS pada bulan Februari 2020 tercatat sebesar 4,99%, indikator tersebut menunjukkan angka yang relatif tinggi karena dari 100 orang angkatan kerja terdapat sekitar 5 orang pengangguran. Permasalahan tingginya pertumbuhan ekonomi dan tingginya jumlah pengangguran menjadikan pemicu dan potensi bagi para pencari kerja untuk bermigrasi sebagai pencari kerja di negara lain.

Secara hukum Internasional disebutkan bahwa suatu negara memiliki kewajiban mutlak untuk melindungi seluruh hak setiap warga negaranya yang tinggal di luar negeri. Apakah warga negara tersebut berprofesi sebagai pekerja di sektor informal, sektor formal, menempuh pendidikan di sekolah-sekolah negara tujuan, berwisata, atau pun berstatus domisili tidak permanen. Merujuk pada istilah yang lazim digunakan dalam menjalin hubungan antar-negara, untuk perlindungan terhadap warga negaranya tersebut seringkali dikatakan dengan istilah *diplomatic protection*. Menurut Forecast “*diplomatic protection is action taken by a state*

---

<sup>4</sup> Badan Pusat Statistik. Ekonomi Indonesia 2020 Turun sebesar 2,07 Persen (c to c) .<https://www.bps.go.id/pressrelease/2021/02/05/1811/ekonomi-indonesia-2020-turun> . (diakses 21 Januari 2022)

*against another state in respect of injury to the person or property of national caused by an internationally wrongful act or omission attributable to the latter state.*"<sup>5</sup>

Kementerian Luar Negeri Indonesia mempunyai peranan yang sangat penting dalam perlindungan terhadap hak-hak warga negaranya di luar negeri. Perlindungan tersebut mencakup beberapa masalah yang seringkali terjadi pada warga negara Indonesia, seperti penyalahgunaan obat-obat terlarang (narkoba, ekstasi, ganja, dll), pembunuhan, pemerkosaan, pelecehan seksual, penyiksaan oleh majikan, kecelakaan lalu-lintas, *trafficking*, *people smuggling*, penyanderaan oleh kelompok organisasi terlarang di negara tujuan (teroris, ISIS, dan kelompok agama radikal lainnya), dan pelanggaran kontrak kerja. Selain itu, Kemenlu juga telah berusaha melakukan perlindungan hak-hak warga negaranya tersebut melalui penerbitan Peraturan Pemerintah, *policy paper*, dan menciptakan beberapa kelompok kerja yang melibatkan berbagai *stakeholder* terkait dengan permasalahan yang sedang dibahasnya.

Merujuk pada situasi dan kondisi realita yang seringkali dialami oleh para pekerja migran sektor informal, formal, dan yang tinggal menetap di Saudi Arabia bahwa mereka memiliki hak yang sama untuk mendapatkan perlindungan dan jaminan keamanan dari Pemerintah Indonesia. Melalui penelitian ini diharapkan dapat mengungkap berbagai permasalahan/kasus berkaitan dengan jaminan keamanan yang dialami para pekerja migran dan cara-cara penyelesaiannya yang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia.

Pada penelitian ini penulis ingin membuktikan bahwa, melalui penelusuran menggunakan pendekatan bidang diplomasi bagi perlindungan keamanan hak-hak Pekerja Migran Indonesia yang berada di Saudi Arabia, maka dapat mengungkapkan adanya berbagai kebijakan maupun diplomasi yang digunakan oleh Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Luar Negeri dalam menyelesaikan berbagai kasus pelanggaran hukum oleh pekerja migran di Saudi Arabia.

---

<sup>5</sup> Forecast."Responsibility of States for Internationally Wrongful Acts, with Commentaries. *Jurnal Of Law*.(2001)

## **1.2 Rumusan Masalah**

Dalam perumusan masalah, penulis ingin mengukur efektivitas penggunaan multitrack diplomasi terutama dalam menuntaskan permasalahan kehidupan sosial pekerja migran Indonesia di Arab Saudi melalui beberapa pertanyaan berikut.

1. Bagaimana diplomat Indonesia menerapkan strategi *Multitrack Diplomacy* dalam rangka membela dan menjamin keamanan Pekerja Migran Indonesia yang terlibat kasus hukuman mati di Arab Saudi?
2. Apa saja tantangan yang terjadi dalam proses diplomasi pembelaan perlindungan Pekerja Migran Indonesia dalam kasus hukuman mati di Arab Saudi?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Pada penelitian yang berjudul “Implementasi *MultiTrack Diplomacy* Dalam Memberi Jaminan Keamanan Pekerja Migran Indonesia di Arab Saudi Periode 2016-2020” bertujuan untuk mengidentifikasi berbagai masalah pelanggaran hukum yang terjadi pada para Pekerja Migran di Arab Saudi. Selain itu, juga bertujuan untuk menganalisis berbagai pelanggaran yang terjadi pada para Pekerja Migran Indonesia tersebut, bagaimana proses diplomasi yang dilakukan oleh diplomat negara kita untuk menyelamatkan hak para Pekerja Migran Indonesia baik finansial maupun kemanusiaan, yang dikaji melalui perspektif teori-teori dalam Ilmu Hubungan Internasional.

## **1.4 Kegunaan Penelitian**

Penelitian ini bermanfaat untuk memberikan informasi dan pembelajaran kepada publik tentang berbagai permasalahan sosial dan penanganannya yang dihadapi oleh para Pekerja Migran Indonesia melalui hubungan multitrack diplomasi yang dilakukan oleh para diplomat kita di negara Arab Saudi.



## **1.5 Sistematika Penulisan**

Sistematika dalam penulisan penelitian ini terbagi menjadi 5 (lima) bagian yang terdiri atas :

### **BAB I**

Isi kajian dalam Bab I adalah menjelaskan secara rinci tentang latar belakang (alasan) dari pemilihan judul pada penelitian ini, menentukan rumusan permasalahan yang tepat, menjelaskan tujuan dan kegunaan dari dilaksanakannya penelitian ini.

### **BAB II**

Pada Bab kedua berisi materi tentang tinjauan pustaka yang didalamnya terdapat kajian-kajian serumpun ilmu yang merupakan hasil peneliti sebelumnya, proses ini juga merupakan bagian dari penyusunan kerangka berpikir dalam penelitian ini. Dalam bab ini peneliti juga mencantumkan beberapa teori yang dapat mendukung dalam menjawab rumusan masalah tersebut.

### **BAB III**

Pembahasan dalam bab ini akan meliputi metode penelitian yang digunakan dalam pengambilan data maupun teknik analisis data yang berbasis pada perspektif multitrack diplomasi.

### **BAB IV**

Pada bagian ini penulis akan menganalisis melalui berbagai pendekatan yang berbasis multitrack diplomasi yang dilakukan oleh para diplomat Indonesia kepada Pemerintah Arab

Saudi. Strategi dan solusi yang digunakan mereka apa untuk menyelamatkan perlindungan hak dan jaminan keamanan para Pekerja Migran Indonesia di negara Arab Saudi.

## BAB V

Bagian ini menjadi penutup dari rangkaian sistematika penulisan yang dilakukan oleh peneliti, maka dari itu bagian ini akan menjelaskan hasil dari penelitian yang dilakukan berupa kesimpulan, kritik dan saran dari penulis terhadap langkah diplomasi yang dilakukan oleh diplomat Indonesia dalam menyelamatkan tenaga kerja Indonesia yang melakukan pelanggaran hukum di Arab Saudi.

